

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).*

_____. *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).*

_____. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).*

_____. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).*

B. Buku

Arifin, Firmansyah. et al. *Lembaga Negara dan Perselisihan Kewenangan Antar Lembaga Negara.* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005)

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* (Edisi Kedua, Cetakan Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

_____. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

_____. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.* (Jakarta : Konstitusi Press, 2006).

_____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Hidayat, Arief et al. *Penataan Auxillary State Organs.* (Semarang : Badan Penerbit Universaitas Diponogoro, 2011).

Kusnardi, Moh dan Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988)

- Manan, Bagir. *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan?)*. (Jakarta: Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI Nomor 244,2006)
- Nazriyah, Riri. *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press ,1986).
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press,1986).
- _____.dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007)
- Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta Timur:Ghalia Indonesia, 1984)
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Cetakan Pertama. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2006).
- Tim Antarkementrian Pengkajian Penataan Lembaga Non Struktural, *Kajian Penataan Lembaga Non Structural : Analisis Terhadap Eksistensi 11 Lembaga Non Structural*, (Jakarta : Sekretariat Negara, 2010).
- Wirjono, Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. (Jakarta Timur: Dian Rakjat, 1983)
- Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004)
- Izlindawati, Asmaeny Azis. *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2018)
- Nurtjahjo, Hendra. *Fungsi dan Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: Ringkasan Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 2016)
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*, (Malang : Intrans Publishing, 2016)

C. Jurnal

- Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. I No. 1 November 2012.
- Sumakul, Nastasia. “Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi”. *Lex Crimen*Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.
- Basarah, Ahmad . “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State`S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. *MMH*. Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

- Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun Ke-35 No.3 Juli September 2005.
- Sidharta, B. Arief. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum) "Rule of Law"*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Sayuti. "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia". *Nalar Fiqh : Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*. Vol.2 No.2, Desember 2011.
- Rahmatullah, Indra dan Rizza Zia, "Memperkuat Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Bingkai Negara Hukum". *Salam*. Vol.3 No.2, 20 Mei 2016.
- Rahmatullah, Indra. "Rejunivasi Sistem Check And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*. Vol.1 No.2 Desember 2013.
- Pitoy, Hezky Fernando. "Mekanisme Check And Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Sistem Pemerintahan Preisdensial Di Indonesia", *Lex Et Societatis*, Vol.II/No.5/Juni/2014.
- Aris, Ismail. "Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif The New Separation Of Power". *Jurnal Jurisprudence*. Vol 5 Nomor 1 Juni 2018.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum". *Jh Ius Quia Iustum*. No.4 Vol.24, Oktober 2017.
- Sulistyo, Fadzlun Budi. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi". *Gorontalo Law Review*. Vol.2 No.2, Oktober 2019.
- Nugroho, W. "Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia". *Gema Keadilan*. Vol.1, No.1, Pp. 49-54, Oct. 2014.

D. Internet

- Ihsanuddin. "MK Tolak Gugatan Hak Angket KPK, 4 Hakim Beda Pendapat". <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/02/08/15254161/mk-tolak-gugatan-hak-angket-kpk-4-hakim-beda-pendapat>. *Kompas.com*. 08 Februari 2018.
- Ihsanuddin. "Mahfud MD: Putusan MK soal Angket KPK bertentangan dengan 4 sebelumnya". <https://nasional.kontan.co.id/news/mahfud-md-putusan-mk-soal-angket-kpk-bertentangan-dengan-4-sebelumnya>. *Kompas.com*. 9 Februari 2018.
- Anonim. "Hak DPR". <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>. 2016.
- Santi Dewi. "Para Pegawai Akan dilebur jadiASN, Gimana Nasib Karyawan KPK?". <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/para-pegawai-kpk-dilebur-jadi-asn-gimana-nasib-karyawan-kpk/1>. *IDN Times*. 18 September 2019.
- Ahda Bayhaqi. "Jubir MK sebut 6 Hakim Sepakat KPK masuk ranah eksekutif". <https://www.merdeka.com/peristiwa/jubir-mk-sebut-6-hakim->

[sepakat-kpk-masuk-ranah-eksekutif.html](#). *Merdeka.com*. 15 Februari 2018.

Ihsanuddin, “Mahfud MD: Putusan MK soal Angket KPK bertentangan dengan 4sebelumnya”.<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/09/09004431/mahfud-md-putusan-mk-soal-angket-kpk-bertentangan-dengan-4-putusan>. *Kompas.com*. 9 Februari 2018.

Dian Saraswati, “MK Bantah Inkonsisten Dalam Putusan Terkait Pansus Angket KPK”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180215133429-12-276427/mk-bantah-inkonsisten-dalam-putusan-terkait-pansus-angket-kpk>. *CNN indonesia*. 15 Februari 2018.